

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS
PINJAMAN DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN PADA
MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN
1997/1998-2008**

SKRIPSI



oleh:

M. ILHAM RAMADHANI

NIM F 0104074

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2009

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KAPASITAS PINJAMAN DAERAH SEBELUM OTONOMI DAERAH DAN PADA MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 1997/1998 – 2008

Muhammad Ilham Ramadhani

F 0104074

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Depok sebelum otonomi daerah maupun pada saat otonomi daerah. Kedua, mengetahui kemandirian keuangan daerah Kota Depok dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan rasio kemandirian dan pola hubungannya. Ketiga, mengetahui kemampuan Kota Depok dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari sisa pokok pinjaman daerah dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Data yang digunakan adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 12 (duabelas) tahun anggaran, yaitu dari tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2008. Tahun anggaran 1997/1998 dikategorikan sebagai periode sebelum otonomi daerah dan tahun anggaran 2001 – 2008 dikategorikan sebagai periode pada masa otonomi daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, celah fiskal, upaya fiskal, rasio aktivitas, analisis efektifitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, jumlah sisa pokok pinjaman daerah, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Depok terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pada masa otonomi daerah Kota Depok mengalami peningkatan kinerja keuangan bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah bila dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, celah fiskal, upaya fiskal. Kota Depok dapat dikatakan mulai mandiri secara keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan jika diukur dari rasio kemandirian dan pola hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan proporsi PAD terhadap TPD tergolong rendah baik sebelum otonomi daerah maupun pada masa otonomi daerah. rasio PAD sebelum otonomi daerah sebesar 4,25% dan pada masa otonomi daerah rata-rata sebesar 11,33%. Tingkat kemandirian Kota Depok 55,27% pada masa otonomi daerah dengan pola hubungan partisipatif. Hasil pengujian test mean menunjukkan bahwa jumlah sisa pokok pinjaman dan *Debt*

Service Coverage Ratio (DSCR) Kota Depok pada masa otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Mengacu pada penelitian, maka diajukan beberapa saran yaitu pertama, peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kedua, mengoptimalkan penerimaan daerah dari pos pinjaman daerah dan menggunakannya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Ketiga, berhati-hati dalam pengelolaan pinjaman sehingga tidak menjadi beban baru dalam anggaran berikutnya. Keempat, diperlukan ahli untuk mengelola dan mengkaji pinjaman daerah agar tidak terjadi deficit pada anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, banyak terjadi perubahan kebijakan daerah di Indonesia. Kedua Undang-undang ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, kecuali urusan pertahanan, keamanan, kehakiman, internasional, dan moneter. Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan (*power sharing*) dan desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*) mulai dilaksanakan secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2001. Konsekuensinya, daerah menyelenggarakan urusan yang sangat luas terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan dan penyediaan pelayanan publik.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2002 ; 6).

Diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan mampu membawa nuansa dan semangat baru bagi tercapainya Pemerintah Daerah yang mandiri. Paradigma Pemerintah Daerah di era otonomi daerah seharusnya mengacu pada tujuan awal ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu bahwa daerah diberi kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, esensi otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan potensi daerah dengan meningkatkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun di daerahnya masing-masing. Pembangunan di segala bidang yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini terus diupayakan dapat meningkat baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Demikian juga pembangunan di bidang ekonomi. Dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi maka diharapkan taraf penghidupan masyarakat menjadi lebih baik, tingkat kemakmuran semakin tinggi, ketimpangan pendapatan yang terus berkurang, kesempatan kerja semakin luas dan juga kualitas sumber daya manusia kian membaik.

Implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah akan dapat berhasil jika memperhatikan 5 (lima) kondisi strategis berikut : (i) *Self Regulating*

Power, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan Otonomi Daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif ke arah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) *Managing Financial Resource*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta (v) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas penyelesaian masalah (Rasyid dan Paragoan dalam Eko W. Suwardono, 2002: 8-9).

Keberhasilan Otonomi Daerah menurut Yosef Riwukaho (1998: 129) ditentukan oleh 4 (empat) faktor berikut : (i) faktor sumber daya manusia sebagai subjek penggerak; (ii) faktor keuangan yang merupakan indikasi “derajat kemandirian suatu pemerintah daerah” untuk mengatur, dan membiayai rumah tangganya sendiri; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen.

Desentralisasi di Indonesia memiliki arti yang luas dan menimbulkan masalah yang baru dalam pembangunan daerah, sebab selain keadaan keuangan pemerintah pusat yang sedang hancur juga kondisi di

banyak daerah yang secara ekonomi maupun institusional belum siap. Hal ini diketahui dari rata-rata kemampuan daerah yang tercermin dalam rasio antara PAD terhadap APBD yang relatif masih rendah yaitu dibawah 20% (Mardiasmo, 2002 : 155). Maka sekali lagi implikasi baik daerah yang sudah maju ataupun yang masih terbelakang harus lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing termasuk dari aspek pembiayaannya. Tentu saja semakin kecil ketergantungan daerah terhadap kucuran dana dari pemerintahan pusat maka tingkat kemandiriannya akan semakin tinggi.

Untuk mewujudkan semua hal itu yang sebenarnya adalah pengaplikasian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, maka sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan akan dituangkan dalam APBD yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Dalam masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa

menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Rokhedi P. Santosa, 2003: 148).

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan memiliki keuntungan, antara lain dapat mengatasi keterbatasan kemampuan riil atau nyata pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Dengan pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah-daerah yang dimaksud. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. Untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat pinjaman jangka panjang dianggap lebih efektif daripada pinjaman jangka pendek (Rokhedi P. Santosa, 2003: 148).

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan di daerahnya. Kota Depok memiliki kondisi geografis yang cukup strategis untuk menjelaskan pembangunan ekonomi serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Pemerintah daerah yang diserahi tugas dalam melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan berhasil dengan baik atau tidak. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya menggunakan beberapa analisa seperti analisa rasio keuangan terhadap APBD yang selanjutnya analisa ini akan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Depok jika dikaitkan dengan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Celah Fiskal, Upaya atau Posisi Fiskal, Rasio Aktivitas, dan Efektifitas PAD sebelum dan pada masa Otonomi Daerah?
2. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kota Depok dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebelum dan pada masa otonomi daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian dan Pola Hubungannya?
3. Bagaimana Kapasitas Pinjaman Daerah Kota Depok yang dihitung dengan jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Depok tersebut penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah Kota Depok dalam menghadapi otonomi daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi yang diukur dengan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Celah Fiskal, Upaya atau Posisi Fiskal, Rasio Aktivitas, dan Efektifitas PAD.
2. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian dan Pola Hubungannya.
3. Mengetahui kemampuan Kota Depok dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah melalui pinjaman daerah yang diukur dengan Model Sisa Pokok Pinjaman Daerah dan Model *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat digunakan untuk memperluas pemikiran mengenai ekonomi perencanaan regional.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perumus kebijakan (Pemerintah Daerah kabupaten/kota) supaya dapat tercipta pemerintahan yang *Good Governance*.
3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Otonomi daerah

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *local accountability* yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang public (Smith dalam Abdul Halim, 201:176).

Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan otonomi daerah mendesak untuk dilaksanakan, antara lain :

- a. Pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat masih didominasi di daerah tertentu (khususnya di Pulau Jawa) dan di daerah-

daerah sekitar Jakarta, sementara pembangunan di beberapa kawasan lain masih terbelakang. Dengan kata lain pembangunan yang selama ini terjadi, terlalu banyak menimbulkan “*mis-allocation*” sumberdaya pembangunan dan menimbulkan banyak peluang terjadinya berbagai penyimpangan di tingkat pemerintah pusat. Model pembangunan yang salah pada masa Orde Baru telah menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat dengan wujud antara lain berupa utang luar negeri yang sangat besar untuk ukuran Negara Sedang Berkembang.

- b. Daerah-daerah yang kaya SDA (Sumber Daya Alam), seperti Riau, Kalimantan Timur, Papua, Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan sebagainya tidak mendapatkan bagi hasil pendapatan secara memadai untuk pembangunan di daerahnya. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa hasil kekayaan SDA dari daerah-daerah tersebut hanya dirasakan oleh beberapa golongan tertentu yang semasa pemerintahan Orde Baru dekat dengan pemerintah pusat.
- c. Berbagai bentuk ketimpangan muncul, baik berupa ketimpangan ekonomi, yang ditunjukkan besaran PDRB, aliran modal/investasi (baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri), alokasi kredit perbankan, dan lainnya, maupun dalam arti social, yang ditunjukkan oleh kualitas penduduk (disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat pendidikan maupun kesehatan), kemajuan peradaban, mobilitas informasi, dan sebagainya (Simanjuntak dalam Mulyanto, 2002:30-31)

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public (*public service*) dan memajukan

perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002:59) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota tentu merupakan suatu kebijakan yang harus didukung, karena ini berarti daerah kabupaten/kota akan menjadi basis penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa pertimbangan yang melandasi penetapan Daerah Kabupaten/Kota sebagai titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah (Mudrajat Kuncoro, 1995:4):

- a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten dan daerah kota kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalism secara relative bias minim.
- b. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relative lebih efektif.
- c. Daerah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten/kota yang lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada factor-faktor, perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan supaya daerah bersangkutan dapat

mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

2. Keuangan Daerah

a. Dimensi Umum Keuangan Daerah

Diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan mampu membawa nuansa dan semangat baru bagi tercapainya Pemerintahan Daerah yang mandiri. Paradigma Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah seharusnya mengacu pada tujuan awal ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu bahwa daerah diberi kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, esensi otonomi daerah harus diterjemahkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan potensi daerah dengan meningkatkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun di daerahnya masing-masing.

Pembangunan di segala bidang yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini terus diupayakan dapat meningkat baik dari

aspek kualitas maupun kuantitas. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat. Dengan kondisi seperti ini, setiap daerah diharapkan dapat menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan guna membiayai keperluan pembangunan di daerah. Pembenahan terhadap permasalahan keuangan daerah, didasari pada beberapa kelemahan yang selama ini ada, yaitu (Mulyanto, 2002:17):

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah belum dilakukan dengan optimal.
- 2) Terbatasnya peran DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian maupun pada saat evaluasi anggaran.
- 3) Masih berorientasi pada *input* (penggunaan anggaran yang tersedia), disbanding kepada *output* dan *outcome* (pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat).
- 4) Sistem akuntansi yang digunakan pada umumnya masih bertumpu pada *cash basic system* dan *single entry system* daripada *accrual basic system* dan *double entry system*.
- 5) Pengendalian dan pengawasan lebih tertuju kepada aspek keuangan (*financial aspect*) disbanding kepada masalah manajemen dampak atau kinerjanya (*performa aspect*).

b. Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 Ayat (1) PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melaksanakan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya (E. Koswara dalam Abdul Halim, 2001: 167-168):

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus menjadi bagian dari sumber keuangan, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar.

Reformasi keuangan daerah sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah memberikan peluang untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola anggaran daerah tanpa banyak campur tangan Pemerintah Pusat atau Propinsi (Pasal 40 PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah). Untuk itu diperlukan penganggaran yang baik untuk dapat mengatasi kesulitan misalnya dalam penentuan pajak. Tujuan anggaran menurut M. Arief Jamaludin dalam Indra Bastian, 2001:8 adalah :

- 1) Untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
- 2) Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya.
- 3) Untuk memperinci penggunaan sumber-sumber menurut obyek pembelanjanya sehingga dapat memudahkan pengawasan terhadap penggunaan penerimaan pemerintah misalnya digunakan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.
- 4) Untuk digunakan sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber-sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan-pembatasan penggunaannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran.
- 5) Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek-proyek pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Hal ini dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam Pasal 8 dinyatakan: “APBD disusun dengan pendekatan kinerja”. Hal ini mengandung maksud bahwa di dalam penyusunan APBD, menggunakan system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) atas dasar perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah

ditetapkan. Di samping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran dalam APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Dalam penyusunan APBD atas dasar kinerja paling tidak harus memuat adanya 3 (tiga) hal, yaitu (Mulyanto, 2002:4):

- 1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- 3) Bagian APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan.

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Devas dalam Dasril Munir, 2004:7-8):

- 1) Tanggung jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, dan masyarakat Umum.

- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka menengah maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3) Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5) Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut tercapai.

Anggaran daerah merupakan salah alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah, maka dari itu APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut (Abdul Halim, 2001: 78-80):

- 1) Keadilan Anggaran. Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipilih oleh segenap lapisan masyarakat daerah. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

- 2) Disiplin Anggaran. APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas. Anggaran daerah harus mampu memberikan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomi kepada pihak terkait, masyarakat, pemerintah pusat, maupun pihak-pihak independen yang memerlukan.
- 4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
- 5) Format Anggaran. Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran deficit (*deficit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Tolak ukur dalam anggaran belanja daerah adalah *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran belanja daerah untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal.

Indikator kinerja yang menggunakan *value for money* seharusnya menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang

terbaik (*economical cost*). Dalam arti, unit biaya yang terendah tidak selalu menggambarkan *value for money* yang terbaik, bahkan dengan biaya termurah tidak selalu merupakan hal yang terbaik. Untuk lebih jelasnya mengenai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis akan diuraikan sebagai berikut (Indra Bastian, 2001 : 335-336):

- 1) Efisiensi, adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk mencapai *output* tertentu.
- 2) Efektifitas, adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Ekonomis, adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga yang terbaik yang dimungkinkan.

d. Sumber Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

a) Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Pasal 1 UU No. 34 tahun 2000). Penentuan tariff dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tariff dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan perda yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah.

d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

e) Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah antara lain bersumber dari hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan, antara lain:

a) Bagian Hasil Daerah

Bagian hasil daerah dapat berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Bea Peroleh Hak atas Tanah (BPHT) dan penerimaan dari sumber daya alam.

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu. Kebutuhan Khusus yang dimaksud menggunakan kriteria: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum; dan/atau (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah, antara lain bersumber dari: hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

terdapat dua hal yang dapat dijadikan indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. kinerja anggaran merupakan alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah sedangkan anggaran kinerja merupakan alat atau instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali daerah selaku manajer eksekutif. keuangan daerah dapat dikatakan berhasil bila mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Berdasarkan konsep Musgrave dalam buku ekonomi publik oleh Sukanto Reksohadiprojo (2000) indikator kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap

Total Penerimaan Daerah (TPD) dan Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

Tim peneliti FISIPOL UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991; 19) menentukan tolak ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD sebagai berikut (Dasril Munir, 2004:106).

tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Dasril Munir, 2004: 106).

b. Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*)

Kebutuhan fiskal dapat diartikan pula sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dan kesehatan (M. Suparmoko, 1992:302)

Variabel-variabel kebututhan daerah (*fiscal need*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. kewilayahan meliputi jumlah penduduk dan indeks kemiskinan relatif (proksi *poverty gap*). Sedangkan untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan (Kadjatmiko dalam Mardiasmo, 2002:160).

c. Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*), yang biasanya berupa pendapatan per kapita (M. Suparmoko, 1992:230). Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Variabel-variabel potensi daerah terdiri dari potensi PAD dan potensi penerimaan bagi hasil.

d. Celah Fiskal (*Fiscal Gap*)

Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, dimana kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi hasil yang diterima daerah.

e. Upaya Fiskal (*Tax effort*)

Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (M. Suparmoko, 1992:320). Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan mengetahui kemampuan membayar pajak masyarakat adalah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga meningkat.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004:44). Teori-teori yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori Ekonomi Klasik

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment. Pemerintah tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan perekonomian. Akibat depresi ekonomi dunia, pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang yang berusaha, tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, menjaga keamanan dan

ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha, tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit, berusaha menciptakan iklim yang kondusif sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut (Tarigan, 2004:46-47).

b. Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Teori ini menyatakan agar suatu daerah tumbuh cepat, dikehendaki tingkat tabungan tinggi, impor tinggi, ekspor kecil, serta Capital Output Ratio (COR) kecil. Pertumbuhanyang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat menyeimbang atau tidak. Dalam praktiknya, daerah yang pertumbuhannya rendah. Teori Harrod-Domar sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang masih terbelakang atau hubungan keluarnya sangat sulit. Hasil produksi kurang layak untuk diekspor karena biaya angkut tinggi, maka peningkatan produksi mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal sehingga merugikan konsumen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang. dengan demikian penambahan produksi di satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang (Tarigan, 2004:49-50)

c. Teori Pertumbuhan Neo klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh

karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju kedaerah yang berupah rendah (Arsyad, 1999:116).

d. Desentralisasi Otonomi

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritik maupun secara empirik. Otonomi daerah atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat ataupun pemerintahannasional. Paling tidak ada 14 (empat belas) alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi (Shabir Cheema dan Rondinelli dalam Syaukani, 2002:32-35) yaitu :

- 1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat.
- 2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- 3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat.
- 4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana pemerintah tidak difahami oleh masyarakat setempat atau duhambat oleh elite lokal, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.

- 5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan, di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
- 6) Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah. Dengan demikian pejabat di pusat dapat menggunakan waktu dan energi mereka untuk melakukan pengawasan dan supervisi terhadap implementasi kebijaksanaan.
- 7) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga private di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat.
- 8) Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah petugas di berbagai daerah.
- 9) Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.
- 10) Dengan menyediakan model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali

tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.

- 11) Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif.
- 12) Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen dapat memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor, dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pejabat di pusat.
- 13) Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga akan meningkatkan kepentingan mereka dalam memelihara sistem politik.
- 14) Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa ditingkatkan lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada daerah.

5. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana pinjaman daerah ini merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

a. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

- 1) Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup kekurangan arus kas;
- 2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
- 4) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (*On-Lending*);

- 5) Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Pinjaman Jangka Panjang adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau keseluruhan harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pinjaman Jangka Menengah adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
- 3) Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.

c. Sumber Pinjaman Daerah

- 1) Pemerintah : Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah)
- 2) Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement [SLA]/ on lending)

- 3) Pemerintah daerah lain
- 4) Lembaga keuangan bank
- 5) Lembaga keuangan bukan bank; dan
- 6) Masyarakat

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

d. Persyaratan Pinjaman Daerah

- 1) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya;
- 2) Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5;
- 3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah;
- 4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

e. Prosedur Pinjaman Daerah

Prosedur pinjaman daerah dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu ;

- 1) Pinjaman Daerah dari pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
- 2) Pinjaman daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber selain dari Pinjaman Luar Negeri

- 3) Pinjaman Daerah dari sumber Selain Pemerintah baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batas kumulatif Pinjaman pemerintah dan Pemda.

f. Larangan Penjaminan

- 1) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman hak lain;
- 2) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan;
- 3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

g. Pembayaran Kembali Pinjaman

- 1) Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan Negara yang menjadi hak daerah tersebut.

B. Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian Harmanto Yuandhi Wibowo (2006)

Mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005). Hasil dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sragen relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen belum mampu secara keuangan dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan bila dilihat dari derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan proporsi PAD terhadap TPD tergolong rendah baik sebelum maupun pada masa otonomi daerah. Rasio PAD sebelum otonomi daerah rata-rata sebesar 15,21% dan pada masa otonomi daerah rata-rata sebesar 9,45%. Tingkat kemandirian Kabupaten Sragen hanya sebesar 10,68% pada masa otonomi daerah dengan pola hubungan Instrukturif.

2. Penelitian Yuliati (dalam Abdul Halim, 2004)

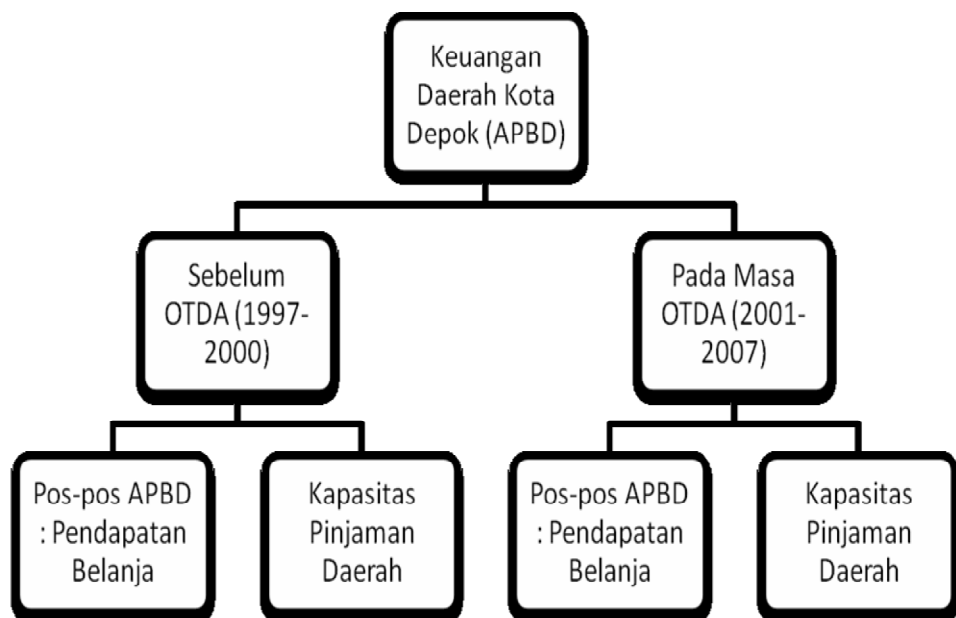
Mengadakan penelitian yang berjudul "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (studi kasus Kabupaten Malang)". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa derajat desentralisasi fiskal yang dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD rata-rata selama kurun waktu lima tahun (1995/1996-2000) sebesar 15%. Jika dilihat dari kemampuan PAD dalam mendanai belanja rutin daerah maka rata-rata selama lima tahun sebesar 32% dan jika ditambah dengan hasil dari bagi hasil pajak/bukan pajak mencapai 62%. Dilihat dari posisi fiskal yang dihitung dengan rata-rata perubahan PAD terhadap rata-rata perubahan PDRB selama kurun lima tahun menunjukkan hasil yang berbeda, jika digunakan PDRB atas dasar harga konstan, maka struktur PAD cukup baik dengan hasil 4,24 (elastis), tetapi jika digunakan PDRB atas dasar

harga berlaku menunjukkan hasil kurang baik yaitu sebesar 0,63 (inelastis).

3. Penelitian Hudi Hariyanto (2004)

Mengadakan penelitian yang berjudul ” Analisis Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Kapasitas Pinjaman Daerah (studi kasus di Kkabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Hasil penelitian untuk perhitungan Kapasitas Pinjaman Daerah menunjukkan bahwa besarnya Rasio Pinjaman Daerah dengan PDRB, Jumlah Sisa Pokok Pinjaman, dan *Debt Service Corrage Ratio* (DSCR) kabupaten dan kota di propinsi daerah istimewa yogyakarta telah memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman daerah.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan. Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat harus mulai dikurangi, untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis terhadap APBD. Waktu penelitian dibagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Analisis dilakukan terhadap pos-pos yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pos-pos tersebut meliputi pos pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan data dari pos APBD tersebut dihitung derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, matrik potensi PAD, rasio aktivitas, efektifitas PAD, Kapasitas pinjaman daerah, serta kemandirian keuangan daerah untuk dapat mengetahui kinerja keuangan daerah selama ini.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan daerah Kota Depok pada masa otonomi dan sebelum otonomi daerah diduga terdapat perbedaan, berdasarkan Derajat Desentralisasi, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Celah Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Aktivitas, dan Efektifitas PAD.
2. Kemandirian Keuangan daerah Kota Depok pada masa otonomi daerah diduga lebih mandiri daripada sebelum otonomi daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian dan Pola Hubungannya.
3. Kemampuan Kota Depok untuk melakukan pinjaman daerah pada masa otonomi daerah diduga lebih baik daripada sebelum otonomi daerah, berdasarkan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian adalah Deskriptif Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, celah fiskal, pinjaman daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah pokok pinjaman dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

2. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Adapun data yang digunakan meliputi :

- a. Data penjabaran Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Depok (Badan Pengelola Keuangan Daerah).
- b. Data gambaran umum Kota Depok yang diperoleh dari Depok dalam angka (Badan Pusat Statistik).
- c. Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok (Badan Pusat Statistik)
- d. Data Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat dan pengeluaran Jawa Barat (Jawa Barat Dalam Angka, BPS).
- e. Data Pinjaman Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Badan Pusat Statistik).

3. Definisi Operasional Variabel

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau lembaga yang dapat dipasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Abdul Halilm, 2004;150)
6. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2004;152)

7. Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada biaya rutin dan belanja pembangunan secara optimal. (Abdul Halim, 2004;153)
8. Kapasitas Fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (tax base), yang biasanya berupa pendapatan per kapita. (Suparmoko, 1987;320)
9. Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD serta kontribusi sumbangan dan bantuan terhadap total APBD.
10. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data yang diperlukan akan dilakukan analisis yang dibagi dalam dua tahap yaitu tahap analisis deskriptif dan tahap analisis kuantitatif.

1. Analisis Deskriptif

Merupakan tehnik analisis data yang tidak berwujud angka, analisis ini berdasarkan pendapat atau pikiran yang penyajinyaa dalam bentuk keterangan-keterangan, penjelasan dan pembahsan secara tertulis. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang perkembangan komponen APBD Kota Depok dari waktu ke waktu.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis yang berdasarkan perhitungan yang menjadi obyek secara ilmiah yang berwujud dalam angka.

a. Hipotesis I

Untuk menguji hipotesis I digunakan rumus :

Untuk menguji apakah kondisi keuangan daerah Kota Depok pada masa otonomi daerah lebih baik daripada sebelum otonomi daerah digunakan rumus sebagai berikut (Djarwanto PS, 1996 : 207-209) :

i) Hipotesis $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Jika tidak terdapat perbedaan kondisi keuangan Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

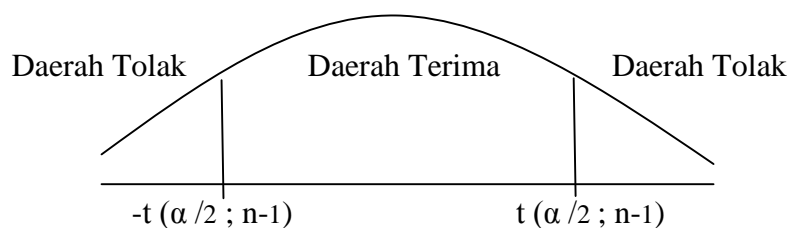
Hipotesis $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Jika terdapat perbedaan kondisi keuangan Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

ii) Level of Significance ($\alpha = 0,05$ dan $t = (\alpha / 2; n-1)$)

iii) Kriteria Pengujian

Gambar 3.1
Kurva Uji Beda 2 Mean



$t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Kesimpulannya μ_1 sama dengan nol (μ_1 tidak signifikan pada tingkat α). Dapat dikatakan bahwa X_1 secara statistik tidak penting (tidak berpengaruh terhadap Y pada tingkat α).

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya μ_1 berbeda dengan nol (μ_1 tidak signifikan pada tingkat α). Dapat dikatakan bahwa X_1 secara statistik penting (berpengaruh terhadap Y pada tingkat α).

Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji signifikan tidaknya koefisien regresi adalah dengan melihat *p-value* dari hasil *print-out software* pengolahan data.

Jika *p-value* > 0,05, maka H_0 diterima ; tidak signifikan.

Jika *p-value* < 0,05, maka H_0 ditolak ; signifikan.

- 1) Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menggunakan ukuran berikut ini (Sukanto Reksomadipuro, 2001;155)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

$$\text{TPD} = \text{PAD} + \text{BHPBP} + \text{SD}$$

- 2) Kebutuhan Fiskal (*fiscall need*) dengan menghitung indeks Pelayanan Publik per Kapita (IPPP) dengan formula sebagai berikut (Sukanto Reksomadipuro, 2001;155) :

$$\text{SKbFP Jabar} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Jawa barat}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa barat}}$$

$$\text{SKbFK Depok} = \frac{\text{PPP}}{\text{SbKFPjabar}}$$

Keterangan :

SKbFP jabar: Rata-rata kebutuhan fiskal standart se-jawa barat

SKbFP depok: Kebutuhan fiskal Kota Depok

PPP: Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah atau pengeluaran aktual per kapita untuk jasa publik.

Jika hasilnya tinggi maka kebutuhan akan fiskalnya rendah.

3) Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)

Kapasitas fiskal dapat dihitung dengan cara :

$$\text{SKaFPjabar} = \frac{\text{PDRBJabar/JumlahPendudukJabar}}{\text{JumlahKabupaten/Kota}}$$

$$\text{KaFkKdepok} = \frac{\text{PDRBDepok/JumlahPenduduk}}{\text{SKaFPJabar}}$$

Keterangan:

SKaFPJabar : Rata-rata kapasitas fiskal se-jawa barat

KaFkKDepok : Kapasitas fiskal Kota Depok

Jika hasilnya tinggi, maka kapasitas fiskalnya tinggi.

4) Celah Fiskal (*Fiscal Gap*)

Celah Fiskal dapat dihitung dengan cara :

Celah Fiskal Jabar : SKbFP Jabar – SKaFPJabar

Celah Fiskal Depok : SKbFP depok – KaFkKDepok

Keterangan :

SKbFP jabar: Rata-rata kebutuhan fiskal standart se-jawa barat

SKaFPJabar: Rata-rata kapasitas fiskal se-jawa barat

SKbFP depok: Kebutuhan fiskal Kota Depok

KaFkKDepok: Kapasitas fiskal Kota Depok

- 5) Upaya atau posisi Fiskal (*tax effort*) dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB, semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah tersebut makin baik dengan formula sebagai berikut (Abdul Halim, 2001;105)

$$\text{Elastisitas PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

- 6) Rasio Aktivitas merupakan keserasian antara Belanja Rutin dan belanja Pembangunan, dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim, 2004;153):

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total BelanjaRutin} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pemb.} = \frac{\text{Total Pembangunan} \times 100\%}{\text{TotalAPBD}}$$

- 7) Analisis Efektifitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meralisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Abdul Halim, 2004;152)

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{RealisasiPAD} \times 100\%}{\text{TargetPAD}}$$

b. Hipotesis II

Untuk menguji hipotesis II dengan menghitung Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004;284) :

$$Rs \text{ Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Bantuan} + \text{Sumbangan} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel 3.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2004;189)

c. Hipotesis III

Untuk menguji hipotesis III digunakan Model Sisa Pokok Pinjaman Daerah dan Model *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan perorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Bila dirumuskan secara matematis, maka DSCR dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU)}{P + B + BL} \geq 2,5$$

DSCR : Debt Service Coverage Ratio

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah dari PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam serta bagian daerah lainnya seperti dari Pajak Penghasilan perseorangan.

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/ tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai.

P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

B : Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

BL : Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang telah jatuh tempo.

Secara umum DSCR merupakan jumlah penerimaan yang tersedia untuk membayar pinjaman dibandingkan dengan jumlah pembayaran pinjaman yang diwajibkan untuk suatu pinjaman.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.107 tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah mengenai Persyaratan Pinjaman Daerah, nilai DSCR paling sedikit 2,5 (dua setengah), jadi bila nilai DSCR suatu daerah lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua setengah) maka daerah boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang, sebaliknya jika nilai DSCR suatu daerah lebih kecil dari 2,5 ($2,5 \geq 2,5 \leq$) maka daerah tidak boleh melakukan pinjaman daerah jangka panjang.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Depok

1. Aspek Geografis

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta. Kota Depok terletak pada garis lintang $6^{\circ}19'00''$ - $6^{\circ}28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}43'00''$ - $106^{\circ}55'30''$ Bujur Timur. Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 Km² yang meliputi 6 kecamatan.

Secara geografis, Kota Depok berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor

Sebelah Barat : Kabupaten Bogor

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2007 mencapai 1.470.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 761.382 jiwa dan perempuan 708.620 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok tahun 2007 3,43 persen. Kecamatan Cimanggis paling besar jumlah penduduknya dibandingkan dengan kecamatan

lain di Kota Depok yaitu sebesar 403.037 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Beji yaitu 139.888 jiwa.

Di tahun 2007, kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.339,37 jiwa/km². Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota Depok dengan tingkat kepadatan 10.033,61 jiwa/km², kemudian kecamatan Beji dengan tingkat kepadatan 9.782,38 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Sawangan yaitu sebesar 3.634,84 jiwa/km².

Tabel 4.1
Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2007

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
Sawangan	86.640	79.436	166.076	3.634,84
Pancoran Mas	139.814	129.330	296.144	9.022,59
Sukmajaya	175.033	167.414	342.447	10.033,61
Cimanggis	209.019	194.018	403.037	7.527,27
Beji	73.457	66.431	139.888	9.782,38
Limo	77.419	71.991	149.410	6.553,07
Kota Depok	761.382	708.620	1.470.002	7.339,37

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2007

3. Aspek Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Depok terus meningkat sebelum maupun selama otonomi daerah dilaksanakan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya sebesar 4,69 persen atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan

Kota Depok pada tahun 2006 sebesar 6,65% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu sebesar 6,96%. Laju pertumbuhan Kota Depok dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 1999-2007

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata2
1	2,00	3,04	3,58	2,23	4,24	4,69	-4,27	0,73	2,03
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5,66	7,04	8,57	7,21	7,27	9,00	7,14	4,49	7,04
4	3,92	4,20	3,87	5,62	5,66	7,85	3,03	3,48	4,70
5	2,40	6,64	3,84	5,54	5,58	2,00	3,49	10,29	4,97
6	3,81	5,59	2,67	5,87	5,91	6,06	9,38	12,01	6,41
7	3,29	3,73	15,38	6,95	6,83	7,94	2,22	2,70	6,13
8	9,30	5,04	6,69	10,09	10,32	6,64	2,80	9,14	7,50
9	2,59	4,77	5,21	4,78	4,83	3,93	8,04	3,87	4,75
PDRB	4,41	5,89	6,10	6,37	6,50	6,96	6,65	6,95	6,22

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2008, data diolah

*) **Keterangan:** Sektor 1 = Pertanian, 2 = Pertambangan dan galian, 3 = Industri pengolahan, 4 = Listrik, gas dan air bersih, 5 = Bangunan, 6 = Perdagangan, hotel dan restoran, 7 = Pengangkutan dan komunikasi, 8 = Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9 = Jasa-jasa.

b. Struktur Ekonomi

Sebelum maupun selama pelaksanaan otonomi daerah, perekonomian Kota Depok tidak terjadi perubahan yang signifikan, dua sektor ekonomi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran tetap menjadi sektor yang dominan dalam kontribusi PDRB Kota Depok dengan rata-rata kontribusi pembentukan PDRB sebelum maupun selama otonomi daerah diatas 30%. Berdasarkan tabel 4.3 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB tahun 2006 adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 2,65%

Tabel 4.3
Persentase Distribusi Sektor Ekonomi Kota Depok Atas Dasar Harga
Berlaku 2000 Tanpa Migas Tahun 1999-2007 (dalam persen)

Sektor	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	3,5	4,0	3,8	3,9	3,5	3,2	2,9	2,6	2,47
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	37,5	38,4	38,2	38,3	38,3	38,5	38,4	37,5	37,03
4	3,2	3,4	3,3	3,9	4,3	4,0	4,8	4,7	4,73
5	7,0	6,6	6,3	5,8	5,8	5,9	5,2	4,8	4,92,
6	30,8	30,4	30,6	30,5	30,4	30,6	30,0	32,3	33,67
7	5,0	5,0	5,4	5,7	5,6	5,6	6,8	6,4	6,02
8	3,8	3,8	3,8	3,6	3,8	3,9	3,8	3,5	3,55
9	8,4	8,1	8,3	8,0	7,9	8,0	7,7	7,9	7,61
jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2008

*) **Keterangan:** Sektor 1 = Pertanian, 2 = Pertambangan dan galian, 3 = Industri pengolahan, 4 = Listrik, gas dan air bersih, 5 = Bangunan, 6 = Perdagangan, hotel dan restoran, 7 = Pengangkutan dan komunikasi, 8 = Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9 = Jasa-jasa.

c. PDRB Perkapita

Selama kurun waktu 1999-2007 PDRB per kapita Kota Depok menunjukkan perkembangan yang positif tiap tahunnya berdasarkan PDRB atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Rata-rata perkembangan PDRB per kapita atas dasar konstan per tahunnya sebesar 2,78% sedangkan menurut harga berlaku sebesar 12,79%. Perkembangan terbesar PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 terdapat pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,61% sedangkan atas dasar harga berlaku pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2005 sebesar 15,38%.

Tabel 4.4
PDRB Per Kapita Penduduk Kota Depok Tahun 1999-2007

Tahun	Atas harga berlaku	Persen	AHK 2000	Persen
1999	2.762.532,99	6,63%	2.987.765,43	9,99%
2000	3.051.691,68	7,33%	3.051.691,68	10,21%
2001	3.470.917,29	8,33%	3.113.484,58	10,41%
2002	3.957.922,09	9,5%	3.190.869,66	10,67%
2003	4.382.013,52	10,52%	3.283.308,19	10,98%
2004	4.827.071,63	11,59%	3.385.720,44	11,33%
2005	5.569.813,08	13,37%	3.508.084,49	11,73%

2006	6.408.948,6	15,39%	3.620.579,94	12,11%
2007	7.198.757,56	17,29%	3.741.064,24	12,51%
Rata-rata Pertumbuhan (%)	12,79%		2,78%	

Sumber: PDRB Kota Depok 2008

4. Aspek Keuangan Daerah

Gambaran mengenai Keuangan Daerah dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut tercantum pos-pos penerimaan yang merupakan sumber pendapatan keuangan daerah dan pos-pos pengeluaran daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia di daerahnya untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan didaerahnya. Terlebih dengan berlakunya otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk dapat lebih mandiri serta jangan terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Kondisi keuangan Kota Depok masih menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 yang menunjukkan bahwa pos pendapatan yang berasal dari dana perimbangan memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan penerimaan dari pos-pos lainnya. Pada tahun 2008 pendapatan dari dana perimbangan yang direalisasikan Kota Depok sebesar Rp 593.140.240.794

Tabel 4.5

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2008 (Anggaran dan Realisasi)

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
I	Pendapatan Asli Daerah	97.139.989.565,57	112.772.271.171,30	116,09%
	a. Pajak Daerah	43.538.335.236,92	48.456.451.986	111,30%
	b. Retribusi Daerah	26.267.935.664	32.979.350.563	125,55%
	c. Bagian Laba BUMD	3.756.353.155	2.656.353.155	70,72%
	d. Lain-lain PAD	23.577.365.509,65	28.680.115.467,30	121,64%
	Dana Perimbangan	574.268.400.146,29	593.140.240.794	103,29%
	Bagian Daerah dari Pajak	139.482.013.146,29	158.353.853.794	113,53%
	Dana Alokasi Umum	427.136.387.000	427.136.387.000	100%
	Dana Alokasi Khusus	7.650.000.000	7.650.000.000	100%
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	172.366.473.898	178.824.878.898	103,75%
	Total Pendapatan	843.774.863.609,86	884.737.390.863,30	104,85%
II	Belanja Daerah	1.030.958.079.440,5	1.030.958.079.440,5	100%
	a. Belanja Tidak Langsung	504.267.579.607,10	504.267.579.607,10	100%
	b. Belanja Langsung	526.690.499.833,29	526.690.499.833,29	100%
	Surplus/ (Defisit)	187.183.215.830,53	146.220.688.577,23	78,11%
III	Pembiayaan Daerah	187.183.215.830,53	146.220.688.577,23	78,11%
	a. Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.511.864.030,53	132.343.499.748,44	66,01%
	b. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.328.648.200,00	13.877.188.828,79	104,12%

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2008.

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif

a. Pertumbuhan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Total penerimaan APBD pada tahun anggaran 1999 sebesar Rp 36.799.882.000,00 dan meningkat 154,4% pada tahun anggaran 2000 menjadi Rp 93.620.290.252,00. Peningkatan persentase kenaikan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena pada tahun 1999 Kota Depok masih berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bogor, dan pada tahun 2000 sehubungan dengan akan dimulainya Otonomi Daerah maka Kota Depok berubah statusnya menjadi Kota Administratif I yang status sebelumnya Kota Administratif II.

Sampai tahun anggaran 2008 APBD Kota Depok mencapai Rp 1.044.286.727.640,00. pertumbuhan APBD dari tahun 1997/1998 – 2008 mengalami peningkatan rata-rata 42,47%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sebelum otonomi daerah sebesar 46,49% dan rata-rata pada masa otonomi daerah sebesar 40,46%. Gambaran tentang pertumbuhan APBD Kota Depok dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Pertumbuhan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 1997/1998 Sampai Tahun 2008

No	Tahun	Total Penerimaan APBD (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	1997/1998	29.540.223.000,00	8,35
2	1998/1999	33.091.205.000,00	12,02
3	1999	36.799.882.000,00	11,20
4	2000	93.620.290.252,00	154,4
5	2001	242.700.721.964,00	159,23

6	2002	338.496.540.000,00	39,47
7	2003	393.162.362.119,02	16,14
8	2004	462.589.805.400,00	17,65
9	2005	534.250.694.945,27	15,49
10	2006	689.819.605.865,97	29,11
11	2007	905.315.660.949,24	31,23
12	2008	1.044.286.727.640,39	15,35
Total		4.803.673.719.135,89	509,71
Rata-rata		400.306.143.261,32	42,47
Rata-rata sebelum Otda		48.262.900.063	46,49
Rata-rata pada masa Otda		576.327.764.860,49	40,46

Sumber : BPKD Kota Depok. Beberapa Tahun.

b. Kontribusi PAD Terhadap APBD

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa selama tahun anggaran 1997/1998 – 2008, kontribusi PAD terhadap APBD Kota Depok rata-rata sebesar 14,38%. Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebelum otonomi daerah sebesar 21,72% sedangkan pada masa otonomi daerah rata-ratanya sebesar 10,71%. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa otonomi daerah, ketergantungan Kota Depok terhadap pemerintah pusat cenderung lebih rendah. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Depok selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Depok Tahun

Anggaran 1997/1998 – 2008

No	Tahun	Total APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi PAD Terhadap APBD (%)
1	1997/1998	29.540.223.000,00	5.465.645.600,00	18,5
2	1998/1999	33.091.205.000,00	7.566.866.368,00	22,86
3	1999	36.799.882.000,00	11.463.019.000,00	31,14
4	2000	93.620.290.252,00	13.453.000.000,00	14,36
5	2001	242.700.721.964,00	41.174.809.473,00	16,96
6	2002	338.496.540.000,00	31.101.240.410,18	9,18
7	2003	393.162.362.119,02	41.165.629.524,00	10,47
8	2004	462.589.805.400,00	43.702.436.417,00	9,44
9	2005	534.250.694.945,27	64.060.869.668,97	11,99
10	2006	689.819.605.865,97	68.631.174.736,00	9,94
11	2007	905.315.660.949,24	75.457.361.773,64	8,33
12	2008	1.044.286.727.640,39	97.139.989.565,57	9,3
Rata-rata				14,38
Rata-rata Sebelum Otda				21,72
Rata-rata pada masa Otda				10,71

Sumber : BPKD Kota Depok.

2. Analisis Kuantitatif

a. Uji Hipotesis 1

1) Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dapat menggunakan beberapa indikator rasio. Pada pertumbuhan ini indikator atau rasio yang digunakan adalah Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.

Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penemuan Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagai mana yang terlihat dalam tabel 4.8 berikut (Dasril Munir, 2004: 106) :

Tabel 4.8

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00 - 10.00	Sangat Kurang
10.01 - 20.00	Kurang
20.01 - 30.00	Cukup
30.01 - 40.00	Sedang
40.01 - 50.00	Baik
> 50.00	Sangat Baik

Sumber : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan tentang Derajat Desentralisasi Fiskal, dapat kita bandingkan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Depok sebelum otonomi daerah (tahun anggaran 1997/1998-2000) dan pada masa otonomi daerah (tahun anggaran 2001-2008). Tabel 4.9 menunjukkan bahwa selama dua belas tahun persentase rata-rata rasio PAD terhadap TPD Kota Depok sebesar 8,97%, sehingga masuk kategori "sangat kurang" kemampuan keuangannya. Jika

dibandingkan antara era sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah, maka terlihat bahwa era sebelum otonomi daerah, persentase rata-rata rasio PAD terhadap TPD sebesar 4,25% lebih rendah dibandingkan pada masa otonomi daerah yaitu sebesar 11,33%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kota Depok pada masa otonomi daerah mengalami peningkatan kemampuan keuangan daerah, yang sebelum otonomi masuk dalam kategori "sangat kurang" dan pada masa otonomi kemampuan keuangan daerahnya dikategorikan "kurang". Perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Depok

Tahun 1997 - 2008

Tahun Anggaran	PAD	TPD	Persen PAD/TPD
1997	5.465.645.600,00	189.160.107.250,00	2,88
1998	7.566.866.368,00	193.652.547.665,00	3,91
1999	11.463.019.000,00	200.893.059.000,00	5,70
2000	13.453.000.000,00	297.597.240.000,00	4,52
2001	41.174.809.473,00	317.561.680.000,00	12,96
2002	31.101.240.410,00	338.496.540.000,00	9,18
2003	41.165.629.524,00	369.678.000.000,00	11,13
2004	43.702.436.417,00	389.067.579.464,95	11,23
2005	64.060.869.669,00	492.823.537.556,97	12,99
2006	68.631.174.736,00	591.934.503.781,00	11,59
2007	75.457.361.774,00	749.346.265.979,95	10,06

2008	97.139.989.566,00	843.774.863.609,86	11,51
Rata-Rata			8,97
Rerata Sebelum Otda			4,25
Rerata Pada Masa Otda			11,33

Sumber : data diolah.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar - 9,838. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya derajat desentralisasi fiskal Kota Depok pada masa otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah.

2) Kebutuhan Fiskal (*Fiscal need*)

Kebutuhan fiskal dapat diartikan pula sebagai biaya pemeliharaan prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dan kesehatan (M. Suparmoko, 1992:302)

Variabel-variabel kebututhan daerah (*fiscal need*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. kewilayahan meliputi jumlah penduduk dan indeks kemiskinan relatif (proksi *poverty gap*). Sedangkan untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan (Kadjatmiko dalam Mardiasmo, 2002:160).

Kebutuhan Fiskal (*fiscall need*) di hitung dengan formula sebagai berikut (Sukanto Reksohadiprojo, 2001;155).

$$\text{SKbFP Jabar} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran Jawa barat}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa barat}}$$

$$\text{SKbFK Depok} = \frac{\text{PPP}}{\text{SbKFPjabar}}$$

Keterangan :

SKbFP jabar: Rata-rata kebutuhan fiskal standart se-jawa barat

SKbFP depok: Kebutuhan fiskal Kota Depok

PPP: Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan per kapita masing-masing daerah atau pengeluaran aktual per kapita untk jasa publik.

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa selama kurun waktu 1998-2008, rata-rata kebutuhan fiskal standar se-Jawa Barat sebesar Rp 3.484,49 sedangkan kebutuhan fiskal Kota Depok sebesar 2.634,78.

Sebelum otonomi daerah, rata-rata kebutuhan fiskal se-Jawa Barat sebesar Rp 2.115,71 sedangkan pada masa otonomi daerah rata-rata kebutuhan fiskal se-Jawa Barat mengalami peningkatan yang besar hingga mencapai Rp 4.168,88

Tabel 4.10

Kebutuhan Fiskal Standar Se-Jawa Barat

Dan Kebutuhan Fiskal Kota Depok

Tahun 1998 -2008

Tahun Anggaran	Kebutuhan Fiskal Standar Se-Jabar (SKbFP Jabar)	Kebutuhan Fiskal Kota Depok (SKbFK Depok)	Persentase

1998	2006,82	216,86	10,80
1999	2293,21	244,89	10,67
2000	2605,07	449,24	17,24
2001	2796,97	1134,40	40,55
2002	3882,17	1454,97	37,47
2003	3644,32	2956,20	81,11
2004	3899,27	3431,01	87,99
2005	4253,55	3836,72	90,20
2006	5029,97	4751,22	94,45
2007	4887,07	6069,59	124,19
2008	4957,76	6856,24	138,29
Rata-rata	3484,49	2634,78	75,61
Rerata sebelum otda	2115,71	281,74	13,31
Rerata pada masa otda	4168,88	3811,29	91,42

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar - 2,892. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebutuhan fiskal di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Kebutuhan fiskal Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

3) Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)

Kapasitas fiskal menunjukkan berapa besar usaha dari daerah yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua kebutuhannya dalam hal ini adalah total pengeluaran rutin dan total pengeluaran pembangunan. Hasil dari indeks kapasitas fiskal menunjukkan seberapa besar hasil yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam setiap daerah. Jika hasilnya tinggi, maka kapasitas fiskalnya tinggi. Kapasitas fiskal dapat dihitung dengan cara :

$$\mathbf{SKaFPJabar} = \frac{PDRBJabar/JumlahPendudukJabar}{JumlahKabupaten/Kota}$$

$$\mathbf{KaFkKDepok} = \frac{PDRBDepok/JumlahPenduduk}{SKaFPJabar}$$

Keterangan:

SKaFPJabar : Rata-rata kapasitas fiskal se-jawa barat

KaFkKDepok : Kapasitas fiskal Kota Depok

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas fiskal se-Jawa Barat dan Kota Depok, maka kondisi kapasitas fiskal se-Jawa Barat dan Kota Depok dapat dilihat pada tabel 4.11.

Dari tabel 4.11 dapat dilihat, dari tahun 1998 sampai 2008 rata-rata kapasitas fiskal standar Jawa Barat adalah Rp 22.200,28 sedangkan kapasitas fiskal Kota Depok 346,96.

Apabila dilihat dari rata-rata, kapasitas fiskal sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah terlihat mengalami penurunan, yaitu dari 361,96 pada era sebelum otonomi daerah menjadi 341,33 pada era otonomi daerah. Bila dilihat dari rata-rata kapasitas fiskal

Kota Depok, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh antara rata-rata sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

Namun demikian, pada masa otonomi daerah ini pun kapasitas fiskal di Kota Depok masih lebih kecil daripada kebutuhan fiskal Kota Depok. Selisih kurang tersebut diharapkan dapat ditutup melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Kota Depok masih tergantung kepada bantuan dari pusat

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 1,297. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kapasitas fiskal di Kota Depok baik sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

Tabel 4.11

**Kapasitas Fiskal Se-Jawa Barat
dan Kapasitas Fiskal Kota Depok
Tahun 1998 - 2008**

Tahun Anggaran	Kapasitas Fiskal Se-Jawa Barat (SKaFP Jabar)	Kapasitas Fiskal Kota Depok (KaFK Depok)	Persentase
1998	16436,21	364,60	2,21
1999	17546,69	362,69	2,06
2000	18910,43	358,60	1,89
2001	19584,21	306,69	1,56
2002	24049,83	314,31	1,31

2003	24632,33	323,41	1,31
2004	23726,62	333,51	1,40
2005	23103,53	345,57	1,49
2006	24449,29	356,64	1,45
2007	25403,38	368,58	1,45
2008	26360,67	381,88	1,44
Rata-rata	22200,28	346,96	1,56
Rerata sebelum otda	17631,11	361,96	2,05
Rerata pada masa otda	23913,73	341,33	1,43

Sumber: Data diolah

4) Celah Fiskal (*Fiscal Gap*)

Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, dimana kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi hasil yang diterima daerah.

Celah Fiskal dapat dihitung dengan cara :

Celah Fiskal Jabar : SKbFP Jabar – SKaFPJabar

Celah Fiskal Depok : SKbFP depok – KaFkKDepok

Keterangan :

SKbFP jabar: Rata-rata kebutuhan fiskal standart se-jawa barat

SKaFPJabar: Rata-rata kapasitas fiskal se-jawa barat

SKbFP depok: Kebutuhan fiskal Kota Depok

KaFkKDepok: Kapasitas fiskal Kota Depok

Perhitungan celah fiskal dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa rata-rata celah fiskal Jawa Barat adalah -18.540,63. Sedangkan rata-rata celah fiskal Jawa Barat pada masa otonomi daerah yaitu -19.744,84 dan rata-rata celah fiskal Jawa Barat sebelum otonomi daerah sebesar -15.329,40.

Tabel 4.12

**Celah Fiskal Se-Jawa Barat
dan Celah Fiskal Kota Depok
Tahun Anggaran 1998 – 2008**

Tahun Anggaran	Celah Fiskal Jawa Barat	Celah Fiskal Kota Depok	Persentase
1998	-14429,39	-147,73	1,02
1999	-15253,47	-117,79	0,77
2000	-16305,35	90,63	-0,55
2001	-16787,23	827,71	-4,93
2002	-20167,66	1140,65	-5,65
2003	-20988,01	2632,78	-12,54
2004	-19827,35	3097,50	-15,62
2005	-18849,98	3491,15	-18,52
2006	-19419,31	4394,57	-22,62
2007	-20516,31	5701,01	-27,78
2008	-21402,90	6474,35	-30,24
Rata-rata	-18540,63	2507,72	-12,43
Rerata Sebelum Otda	-15329,40	-58,30	0,41

Rerata Pada Masa Otda	-19744,84	3469,97	-17,24
-----------------------	-----------	---------	--------

Sumber : Data Diolah

Rata-rata celah fiskal di Kota Depok sebesar 2.507,72 sedangkan rata-rata celah fiskal Kota Depok sebelum otonomi daerah adalah -58,30 dan rata-rata celah fiskal Kota Depok pada masa otonomi daerah adalah 3.469,97.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar -2,947. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan celah fiskal di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya celah fiskal Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

5) Upaya Fiskal (*Fiscal Effort*)

Upaya fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tertentu.

Tabel 4.13

Upaya Fiskal Kota Depok

Tahun Anggaran 1998 – 2008

(berdasarkan harga berlaku)

Tahun	PAD	PDRB (harga berlaku)	persentase

1998	7.566.866.368,00	28.433.490.000,90	26,61
1999	11.463.019.000,00	30.881.800.000,37	37,11
2000	13.453.000.000,00	34.893.130.000,42	38,55
2001	41.174.809.473,00	41.188.820.000,01	99,96
2002	31.101.240.410,00	48.626.160.000,01	63,95
2003	41.165.629.524,00	55.650.950.000,82	73,97
2004	43.702.436.417,00	63.314.230.000,67	69,02
2005	64.060.869.669,00	75.416.660.000,15	84,94
2006	68.631.174.736,00	89.677.790.000,01	76,53
2007	75.457.361.774,00	92.568.230.000,53	81,51
2008	97.139.989.566,00	97.826.450.000,48	99,29
Rata-rata			64,44
Rerata Sebelum Otda			31,04
Rerata Pada Masa Otda			81,15

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.13 dapat dilihat upaya fiskal Kota Depok dengan harga berlaku memiliki rata-rata 64,44%. Sedangkan rata-rata upaya fiskal Kota Depok sebelum otonomi daerah adalah sebesar 31,04% dan pada masa otonomi daerah upaya fiskal Kota Depok sebesar 81,15%.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar - 5,790. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan upaya fiskal dengan harga berlaku di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa

otonomi daerah. Artinya upaya fiskal dengan harga berlaku di Kota Depok setelah otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah.

Tabel 4.14
Upaya Fiskal Kota Depok
Tahun Anggaran 1998 – 2008
(berdasarkan harga konstan)

Tahun	PAD	PDRB (Harga Konstan)	Persentase
1998	7.566.866.368,00	32.889.310.000,45	23,01
1999	11.463.019.000,00	33.420.820.000,42	34,29
2000	13.453.000.000,00	34.893.130.000,42	38,55
2001	41.174.809.473,00	36.947.220.000,33	111,44
2002	31.101.240.410,00	39.202.320.000,26	79,33
2003	41.165.629.524,00	41.697.550.000,44	98,72
2004	43.702.436.417,00	44.408.760.000,83	98,41
2005	64.060.869.669,00	47.500.340.000,10	134,86
2006	68.631.174.736,00	50.661.290.000,06	135,47
2007	75.457.361.774,00	54.182.460.000,94	139,26
2008	97.139.989.566,00	57.423.900.000,27	169,16
Rata-rata			90,04
Rerata Sebelum Otda			28,48
Rerata Pada Masa Otda			120,83

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa rata-rata upaya fiskal Kota Depok dengan harga konstan adalah 90,04%. Sedangkan sebelum otonomi daerah rata-rata upaya fiskal Kota Depok adalah 28,48% atau lebih kecil dari rata-rata upaya fiskal Kota Depok pada masa otonomi daerah yang sebesar 120,83% berdasarkan harga konstan.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar - 5,077. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan upaya fiskal berdasarkan harga konstan di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

6) Rasio Aktivitas (keserasian)

Rasio aktivitas (keserasian) dapat dilihat dengan melakukan perhitungan rasio belanja rutin terhadap total pengeluaran dan rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran. Hasil perhitungan terhadap rasio aktivitas dapat kita lihat dalam tabel 4.15.

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa rata-rata rasio belanja rutin terhadap total pengeluaran daerah selama kurun waktu tahun 1998-2002 sebesar 55,48%. Dengan rasio sebesar itu menyebabkan rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran daerah menjadi kecil, yaitu sebesar 43,64%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar total pengeluaran daerah Kota Depok sebagian besar terserap untuk belanja rutin yang digunakan untuk membiayai

keperluan daerah. Sedangkan belanja pembangunan yang digunakan untuk proyek pembangunan yang dapat digunakan oleh masyarakat secara langsung hanya mendapat porsi yang lebih kecil.

Tabel 4.15
Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Terhadap Total Pengeluaran Daerah di Kota Depok
Tahun Anggaran 1998 sampai Tahun Anggaran 2002
(dalam persen)

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Rutin thd Total Pengeluaran Daerah	Rasio Belanja Pemb. thd Total Pengeluaran Daerah
1998	59,48	39,15
1999	61,32	38,68
2000	46,69	50,30
2001	56,31	43,69
2002	53,61	46,39
Rata-Rata	55,48	43,64
Rerata Sebelum Otda	55,83	42,71
Rerata Pada Masa Otda	54,96	45,04

Sumber: data diolah

Apabila dibandingkan perubahan rata-rata rasio belanja rutin pada era sebelum otonomi daerah (1998-2000) dengan pada masa otonomi daerah (2001-2002), terlihat bahwa di Kota Depok mengalami kenaikan. Rata-rata rasio belanja rutin terhadap total pengeluaran

daerah Kota Depok sebelum otonomi daerah yaitu 55,83% dan rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran daerah sebesar 42,71%. Sedangkan pada masa otonomi daerah, Kota Depok memiliki rata-rata rasio belanja rutin terhadap total pengeluaran daerah sebesar 54,96% dan rata-rata rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran daerah sebesar 45,04%.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 0,144 untuk rasio aktivitas belanja rutin dan -0,466 untuk rasio aktivitas belanja aparatur pemerintah. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rasio aktivitas di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah, baik rasio belanja publik maupun rasio belanja aparatur pemerintah.

Tabel 4.16

**Rasio Belanja Publik dan Belanja Aparatur Pemerintah
Terhadap Total Pengeluaran Daerah di Kota Depok
Tahun Anggaran 2003 sampai Tahun Anggaran 2005
(dalam persen)**

Tahun	Rasio Belanja Publik	Rasio Belanja Aparatur Pemerintah
2003	67,67	29,26
2004	66,83	31,92
2005	68,32	30,38

Rata-rata	67,61	30,52
-----------	-------	-------

Sumber : Data Diolah

Dalam anggaran berbasis kinerja (*performance budgetting*) sebagaimana yang diterapkan antara tahun 2003 – 2005 dikenal dua jenis belanja (pengeluaran). Pertama, belanja aparatur pemerintah yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, belanja publik yang kemanfaatannya memang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat rata-rata rasio belanja publik terhadap total pengeluaran daerah selama kurun waktu tahun 2003 – 2005 adalah 67,61%. Sedangkan rasio belanja aparatur pemerintah terhadap total pengeluaran daerah adalah sebesar 30,52%.

Sedangkan pada tahun 2006 sampai tahun 2008 struktur belanja Kota Depok mengalami perubahan, dari belanja publik dan belanja aparatur pemerintah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 4.17

**Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Terhadap Total Pengeluaran Daerah di Kota Depok
Tahun Anggaran 2006 sampai Tahun Anggaran 2008
(dalam persen)**

Tahun	Rasio Belanja Langsung	Rasio Belanja Tidak Langsung
2006	51,82	46,01
2007	52,57	45,98
2008	50,43	48,28
Rata-rata	51,61	46,76

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total pengeluaran daerah di kota Depok dapat dilihat ditabel 4.17.

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio belanja langsung terhadap total pengeluaran daerah adalah 51,61% atau lebih besar dari rasio belanja tidak langsung terhadap total pengeluaran daerah sebesar 46,76%.

7) Efektifitas PAD (Analisis Target dan Realisasi PAD)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik.

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa untuk pos pajak daerah di Kota Depok sebelum otonomi daerah mempunyai rata-rata efektivitas PAD sebesar 107,96% sedangkan rata-rata efektivitas pada masa otonomi daerah sebesar 107,85%. Pos pajak daerah sudah memenuhi target yang ditetapkan sehingga mempunyai rasio efektivitas di atas 100%, dan rata-rata rasio aktivitas pada masa daerah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan era sebelum otonomi daerah.

Tabel 4.18

Rata-rata Efektivitas PAD Kota Depok

Sebelum Otonomi Daerah dan Selama Otonomi Daerah

(dalam persen)

S u m	Bagian PAD	Rata-rata Efektivitas PAD	
		Sebelum Otda	Selama Otda
b	Pajak Daerah	107,96	107,85
e	Retribusi Daerah	107,49	106,76
r	Bagian Laba BUMD	103,49	98,98
S	Lain-lain Pendapatan	104,83	98,21
S			
u			

m

ber : Data diolah

Pos retribusi daerah di Kota Depok sebelum otonomi daerah mempunyai rata-rata efektivitas PAD sebesar 107,49%, lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata efektivitas PAD pada masa otonomi daerah yaitu sebesar 106,76%. Pos retribusi daerah juga sudah

memenuhi target yang ditetapkan sehingga mempunyai rasio efektivitas diatas 100%.

Untuk pos laba Badan Usaha Milik Daerah di Kota Depok sebelum otonomi daerah mempunyai rata-rata efektivitas PAD sebesar 103,49% sehingga belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada masa otonomi daerah, pos laba Badan Usaha Milik Daerah sudah dapat memnuhi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan rata-rata efektifitas PAD menjadi 98,98%.

Untuk pos lain-lain pendapatan di Kota Depok sebelum otonomi daerah mempunyai rata-rata efektivitas PAD sebesar 104,83% dan pada masa otonomi daerah mempunyai rata-rata efektivitas PAD sebesar 98,21%. Pos lain-lain pendapatan baik di era sebelum maupun pada masa otonomi daerah sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan rata-rata efektivitas PAD setelah ada otonomi daerah.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 1,090. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektifitas PAD di Kota Depok baik sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

b. Uji Hipotesis 2

Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ada empat macam pola hubungan (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim, 2004 : 188) yang memperkenalkan "hubungan situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain :

- 1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delekatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori diatas, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Untuk menguji hipotesis II dengan menghitung Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut (Abdul Halim, 2004;284) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan + Sumbangan + Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.19

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. (Abdul Halim, 2004 : 189)

Hasil perhitungan tentang tingkat kemandirian daerah sebelum otonomi daerah (tahun 1998 – 2000) dan sesudah otonomi daerah (tahun 2001 – 2008) dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kota Depok Selama Kurun Waktu 1998 – 2008

(dalam persen)

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1998	45,62	Rendah	konsultatif
1999	39,46	Rendah	Konsultatif
2000	34,68	Rendah	Konsultatif
2001	52,32	Sedang	Partisipatif
2002	53,66	Sedang	Partisipatif
2003	55,66	Sedang	Partisipatif
2004	50,58	Sedang	Partisipatif
2005	52,98	Sedang	Partisipatif
2006	58,31	Sedang	Partisipatif
2007	59,34	Sedang	Partisipatif
2008	59,30	Sedang	Partisipatif
rata-rata	51,08		
rata-rata sblm otda	39,92		
rata-rata pada masa otda	55,27		

Sumber : data diolah.

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa Kota Depok mempunyai rata-rata tingkat kemandirian yang dikategorikan sedang. Rata-rata tingkat kemandirian sebelum otonomi daerah di Kota Depok sebesar 39,92%, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemandirian sesudah otonomi daerah yaitu 55,27%. Dari hasil rasio kemandirian dapat dikatakan bahwa Kota Depok memiliki pola

hubungan partisipatif (peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan Otonomi Daerah).

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar - 5,730. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio kemandirian di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya rasio kemandirian di Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

c. Uji Hipotesis 3

1) Jumlah Sisa Pokok Pinjaman Daerah

Persyaratan pinjaman daerah telah diatur dalam pasal 54 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dalam pasal ini telah disebutkan bahwa jumlah Sisa Pokok Pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 54 huruf (a) UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diuraikan bahwa arti penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan Penerimaan Lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran

tertentu. Hasil perhitungan Sisa Pokok Pinjaman di Kota Depok selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.21.

Pada tabel 4.21 dapat diketahui pada era sebelum otonomi daerah rata-rata jumlah Sisa Pokok Pinjaman Kota Depok sebesar 0,45%. Sedangkan rata-rata jumlah Sisa Pokok Pinjaman sesudah otonomi daerah di Kota Depok adalah sebesar 0,18.

Tabel 4.21

**Hasil Perhitungan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman
Kota Depok Tahun Anggaran 1997/1998 – 2008 (persen)**

Tahun	Jumlah Sisa Pokok Pinjaman
1998	-
1999	0,83
2000	0,51
2001	0,31
2002	0,11
2003	0,36
2004	0,02
2005	0,17
2006	0,19
2007	0,11
2008	0,15
Rata-Rata	0,25
Rerata Sebelum Otda	0,45
Rerata Pada Masa Otda	0,18

Sumber : Data diolah

Besarnya jumlah sisa pokok pinjaman sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu 0,25%. Presentase ini masih relatif kecil dibandingkan dengan batasan 75% sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 54 UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dari tabel 4.21 dilihat bahwa jumlah sisa pokok pinjaman cenderung menurun.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 4,761. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah sisa pokok pinjaman di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya jumlah sisa pokok pinjaman di Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

2) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Kemampuan daerah untuk mendapatkan pinjaman daerah jangka panjang menurut penjelasan pasal 54 huruf (b) UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dapat diukur dengan cara menghitung *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*. Dalam PP No. 107 tahun 2000 disebutkan bahwa batasan DSCR adalah minimal 2,5 (dua setengah). DSCR menunjukkan kemampuan Keuangan Daerah untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya. Pada tabel 4.22 dapat diketahui bahwa pada era sebelum otonomi daerah rata-rata *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* adalah sebesar 110,59.

Sedangkan pada masa setelah otonomi daerah rata-rata *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* adalah sebesar 40,97.

Besarnya *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* sebelum dan sesudah otonomi daerah tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan ketentuan dalam UU No.34 Tahun 2004 dengan batas minimal yang disyaratkan yaitu lebih besar atau sama dengan dua setengah ($\geq 2,5$). Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa Kota Depok belum memanfaatkan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman daerah. Padahal pinjaman daerah, terutama pinjaman jangka panjang merupakan salah satu alternatif bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat, yaitu dengan mengoptimalkan pinjaman daerah yang didapat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.22

**Hasil Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*
Kota Depok Tahun 1997/1998 – 2008**

Tahun	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
1998	106,5
1999	106,8
2000	118,95
2001	41,16
2002	44,54
2003	-

2004	-
2005	114,76
2006	-
2007	57,38
2008	69,97
Rata-Rata	59,96
Rerata Sebelum Otda	110,59
Rerata Pada Masa Otda	40,97

Sumber : Data diolah

Keterangan: tanda (-) berarti daerah tidak mempunyai Pinjaman, Bunga dan Biaya lain yang jatuh tempo sehingga tidak memiliki *DSCR*.

Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 2,858. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *Debt Service Coverage Ratio* (*DSCR*) di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya jumlah *Debt Service Coverage Ratio* (*DSCR*) di Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

Beberapa penyebab kenapa daerah belum bisa mengoptimalkan pinjaman daerah antara lain karena lemahnya kinerja BUMD dalam menjalankan usahanya sehingga sering merugi sehingga menunggak mengembalikan pinjaman, juga karena sumber

dana dari penerbitan obligasi daerah belum dapat dimanfaatkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Penyebab lain adalah belum terbentuknya lembaga pasar modal yang mampu menyediakan dana secara murah dan mudah diperoleh oleh pemerintah daerah, sehingga daerah tergantung pada pemerintah pusat dalam memperoleh dana pinjaman daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a) Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal dengan menggunakan rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (Total Pendapatan Daerah) menunjukkan bahwa pada era sebelum otonomi daerah selama kurun waktu 1998-2000, Kota Depok mempunyai kemampuan keuangan daerah yang dikategorikan cukup. Sedangkan pada era otonomi daerah selama kurun waktu 2001-2008, Kota Depok mempunyai kemampuan keuangan daerah yang dikategorikan kurang. Berdasarkan hasil uji t-test menunjukkan t hitung sebesar -9,838. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan daerah di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya desentralisasi fiskal di

Kota Depok pada masa otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah.

- b) Berdasarkan perhitungan kebutuhan fiskal, diketahui bahwa pada era sebelum otonomi daerah, rata-rata kebutuhan fiskal se-Jawa Barat sebesar Rp 2.115,71 sedangkan kebutuhan fiskal Kota Depok sebesar 281,74. Sedangkan Pada masa otonomi daerah rata-rata kebutuhan fiskal se-Jawa Barat sebesar Rp 4.168,88 dan kebutuhan fiskal Kota Depok pada masa otonomi daerah sebesar 3811,29. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar -2,892. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebutuhan fiskal di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Kebutuhan fiskal Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.
- c) Kapasitas Fiskal Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah terlihat mengalami penurunan, yaitu dari 361,96 pada era sebelum otonomi daerah menjadi 341,33 pada saat era otonomi daerah. Namun demikian, di era otonomi daerah inipun kapasitas fiskal di Kota Depok masih lebih kecil daripada kebutuhan fiskal Kota Depok. Selisih tersebut

diharapkan dapat ditutup melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Kota Depok masih tergantung kepada bantuan dana dari pusat. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 1,297. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kapasitas fiskal di Kota Depok baik sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

d) Celah Fiskal Kota Depok memiliki rata-rata sebesar 65,04 sedangkan celah fiskal Se-Jawa Barat memiliki rata-rata -18.540,63. pada masa sebelum otonomi daerah celah fiskal Kota Depok adalah sebesar 10,85 sedangkan pada masa otonomi daerah adalah sebesar 85,35. Provinsi Jawa Barat sebelum otonomi daerah memiliki rata-rata celah fiskal sebesar -15.329,40. Dan pada masa otonomi daerah sebesar -19.744,84. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar -2,947. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan celah fiskal di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya celah fiskal Kota Depok setelah otonomi daerah dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum otonomi daerah.

- e) Berdasarkan perhitungan upaya fiskal Kota Depok dengan harga berlaku, Kota Depok memiliki rata-rata sebesar 31,04 sebelum otonomi daerah dan meningkat menjadi 81,15 pada masa otonomi daerah. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar -5,790. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan upaya fiskal dengan harga berlaku di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah. Artinya upaya fiskal dengan harga berlaku di Kota Depok setelah otonomi daerah lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Sedangkan upaya fiskal berdasarkan harga konstan, Kota Depok memiliki rata-rata sebesar 28,48 sebelum otonomi daerah dan meningkat menjadi 120,83 pada masa otonomi daerah. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar -5,077. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan upaya fiskal berdasarkan harga konstan di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.
- f) Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas (keserasian), dibedakan menjadi tiga jebis yang pertama adalah berdasarkan rasio belanja rutin dan belanja pembangunan dari tahun 1998 – 2002. Rasio belanja

rutin memiliki rata-rata sebesar 55,83% sebelum otonomi daerah dan 54,96% pada masa otonomi daerah. Sedangkan belanja pembangunan memiliki rata-rata sebesar 42,71% sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah memiliki rata-rata sebesar 45,04%. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 0,144 untuk rasio aktivitas belanja rutin dan - 0,466 untuk rasio aktivitas belanja aparatur pemerintah. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara rasio aktivitas di Kota Depok sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah, baik rasio belanja publik maupun rasio belanja aparatur pemerintah. Sedangkan pada tahun 2003 – 2005 anggarannya berubah nama menjadi belanja publik dan belanja aparatur pemerintah. Rata-rata belanja publik sebesar 67,61% dan belanja aparatur pemerintah sebesar 30,52%. Pada tahun 2006 – 2008 berubah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rata-rata belanja langsung sebesar 51,61% dan belanja tidak langsung sebesar 46,76%.

g) Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas PAD, sebelum otonomi daerah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagian Laba BUMD telah memenuhi target dengan rasio

efektifitas diatas 100%. Sedangkan pada era otonomi daerah bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan belum mampu memenuhi target 100%. Berdasarkan Hasil uji t-test, ditemukan hasil t hitung sebesar 1,090. Karena hasilnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan efektifitas PAD di Kota Depok baik sebelum otonomi daerah dan pada masa otonomi daerah.

2. Rata-rata tingkat kemandirian sebelum otonomi daerah di Kota Depok sebesar 39,92% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemandirian saat otonomi daerah yaitu sebesar 55,27%. Dari hasil rasio kemandirian dapat dikatakan bahwa Kota Depok memiliki pola hubungan partisipatif. Berdasarkan perhitungan uji t-test terhadap jumlah sisa pokok pinjaman, ditemukan hasil t hitung sebesar 4,761. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah sisa pokok pinjaman di Kota Depok pada masa otonomi daerah dan sebelum otonomi daerah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman daerah jangka panjang, menunjukkan bahwa Kota Depok masih memiliki

peluang untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui pinjaman daerah jangka panjang. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Sisa Pokok Pinjaman Daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan UU No.33 Tahun 2004 yaitu sebesar 75% dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang lebih besar dibandingkan dengan ketentuan UU No.33 Tahun 2004 yaitu $\geq 2,5$. Berdasarkan perhitungan uji t-test terhadap *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), ditemukan hasil t hitung sebesar 2,858. Karena hasilnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di Kota Depok pada masa otonomi daerah dan sebelum otonomi daerah. Artinya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) di Kota Depok pada masa otonomi daerah lebih baik di bandingkan sebelum otonomi daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Depok antara lain disarankan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Kebijakan

intensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari.

2. Dengan mengoptimalkan penerimaan daerah dari pos pinjaman daerah dan menggunakannya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil, misal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kota Depok sehingga bias mendatangkan retribusi daerah yang cukup besar, atau digunakan sebagai investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Meskipun memiliki kapasitas pinjaman daerah yang cukup besar namun sebaiknya Kota Depok bertindak hati-hati dalam pengelolaan pinjaman tersebut supaya pinjaman tersebut tidak menjadi beban baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun berikutnya.
4. Diperlukan ahli yang mempunyai kemampuan untuk mengkaji dan mengelola pinjaman daerah, ini diperlukan

untuk menghindari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masa yang akan datang, hingga akhirnya pinjaman daerah secara maksimal diperoleh tanpa mengganggu neraca keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta :AMP YKPN.

_____.2004. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Yogyakarta : AMP YKPN.

BPS Jawa Barat. (Beberapa Terbitan). **Jawa Barat Dalam Angka**. Bandung : BPS Jawa Barat

BPS Kota Depok. (Beberapa Terbitan). **Depok Dalam Angka**. Depok : BPS Kota Depok

BPS Kota Depok. (Beberapa Terbitan). **Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok**. Depok : BPS Kota Depok

Bratakusumah dan Solihin. 2002. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Dasril Munir, dkk. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta : YPAI.

Indra Bastian. 2001. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**. Yogyakarta : BPFE UGM.

Josef Riwo Kaho. 1997. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)**. Jakarta : Rajawali Press

- Lincoln Arsyad. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. Yogyakarta : BPFU UGM.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta :
Andy Offset.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : Andy Offset.
- Mudrajad Kuncoro. 1995. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia". Jurnal Prisma. No
4. Jakarta
- Mudrajad Kuncoro. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah**. Jakarta :
Erlangga.
- M. Suparmoko. 1992. **Keuangan Daerah dalam Teori dan Praktek**. Edisi Keempat,
Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFU UGM.
- Piter Abdullah; Armida S. Alisjahbana; dkk. 2002. **Daya Saing Daerah: Konsep
dan Pengukurannya di Indonesia**. Yogyakarta : BPFU UGM.
- RA Musgrave dan PB Musgrave. 1993. **Keuangan Negara Dalam Teori dan
Praktek**. Jakarta : Erlangga.
- Republik Indonesia. **Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022).
- Republik Indonesia. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Rpublik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Robinso Tarigan. 2004. **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**. Jakarta: Bumi Aksara.

Santoso, Rokhedi P. 2003. "Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume VIII, No.2, 147-158.

Syaukani; Afan Gafar; dkk. 2003. **Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan**. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

UJI INDEPENDT T-TEST DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Group Statistics

	TAHUN_AN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	4	4.2525	1.1787	.5893
	Sesudah OTDA	8	11.4563	1.2030	.4253

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	.011	.917	-9.838	10	.000	-7.2038	.73
	Equal variances not assumed			-9.912	6.216	.000	-7.2038	.72

UJI INDEPENDENT T-TEST KEBUTUHAN FISKAL

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DEPOK	Sebelum OTDA	3	303.6633	126.84969	73.23670
	Pada Masa OTDA	8	3811.2938	2030.11366	717.75357

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means

		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DEPOK	Equal variances assumed	4.610	.060	-2.892	9	.018	-3507.6304	1212.7769
	Equal variances not assumed			-4.862	7.144	.002	-3507.6304	721.4802

UJI INDEPENDENT T-TEST KAPSITAS FISKAL

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DEPOK	Sebelum OTDA	3	361.9633	3.06529	1.76975
	Pada Masa OTDA	8	341.3238	26.59626	9.40320

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DEPOK	Equal variances assumed	6.630	.030	1.297	9	.227	20.6396	15.9096
	Equal variances not assumed			2.157	7.472	.065	20.6396	9.5682

UJI INDEPENDENT T-TEST CELAH FISKAL

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DEPOK	Sebelum OTDA	3	-58.2967	129.84015	74.96325
	Pada Masa OTDA	8	3469.9650	2003.78438	708.44476

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DEPOK	Equal variances assumed	4.559	.062	-2.947	9	.016	-3528.2617	1197.0983
	Equal variances not assumed			-4.953	7.154	.002	-3528.2617	712.3998

UJI INDEPENDENT T-TEST UPAYA FISKAL (HARGA BERLAKU)

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	3	33.9567	6.74734	3.89558
	Pada Masa OTDA	8	81.1463	13.16512	4.65457

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference

PERSEN	Equal variances assumed	1.355	.274	-5.790	9	.000	-47.1896	8.150
	Equal variances not assumed			-7.775	7.449	.000	-47.1896	6.065

UJI INDEPENDENT T-TEST UPAYA FISKAL (HARGA KONSTAN)

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	3	31.9500	8.02992	4.63608
	Pada Masa OTDA	8	120.8313	29.00383	10.25440

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	4.631	.060	-5.077	9	.001	-88.8813	17.505
	Equal variances not assumed			-7.898	8.859	.000	-88.8813	11.253

UJI INDEPENDENT T-TEST RASIO AKTIVITAS (BELANJA RUTIN)

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	3	55.8300	7.96876	4.60076
	Pada Masa OTDA	2	54.9600	1.90919	1.35000

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	5.187	.107	.144	3	.894	.8700	6.024
	Equal variances not assumed			.181	2.325	.871	.8700	4.794

UJI INDEPENDENT T-TEST RASIO AKTIVITAS (BELANJA PEMBANGUNAN)

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	3	42.7100	6.57733	3.79742
	Pada Masa OTDA	2	45.0400	1.90919	1.35000

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	5.102	.109	-.466	3	.673	-2.3300	5.004
	Equal variances not assumed			-.578	2.459	.612	-2.3300	4.030

UJI INDEPENDENT T-TEST EFEKTIVITAS PAD

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	4	105.9425	2.13834	1.06917
	Pada Masa OTDA	4	102.9500	5.05815	2.52907

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	41.824	.001	1.090	6	.318	2.9925	2.745
	Equal variances not assumed			1.090	4.039	.336	2.9925	2.745

UJI INDEPENDENT T-TEST RASIO KEMANDIRIAN

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	3	39.9200	5.48449	3.16647
	Pada Masa OTDA	8	55.2688	3.39610	1.20070

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	.531	.485	-5.730	9	.000	-15.3488	2.678
	Equal variances not assumed			-4.532	2.601	.027	-15.3488	3.386

UJI INDEPENDENT T-TEST JUMLAH SISA POKOK PINJAMAN

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PERSEN	Sebelum OTDA	2	.6700	.22627	.16000
	Pada Masa OTDA	8	.1775	.11068	.03913

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
PERSEN	Equal variances assumed	2.432	.157	4.761	8	.001	.4925	.103
	Equal variances not assumed			2.990	1.123	.183	.4925	.164

UJI INDEPENDENT T-TEST *Debt Service Coverage Ratio (DSRC)*

Group Statistics

	TAHUN	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
DSCR	Sebelum OTDA	3	110.7500	7.10299	4.10091
	Pada Masa OTDA	8	40.9762	40.71443	14.39473

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
DSCR	Equal variances assumed	3.088	.113	2.858	9	.019	69.7738	24.41445
	Equal variances not assumed			4.662	7.998	.002	69.7738	14.96749

Efektifitas PAD Kota Depok Tahun Anggaran 1998 - 2008

TAHUN	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1998	7785650000.00	8659805326.00	111.23	7684230000.00	8365206905.00	108.86
1999	9326780000.00	10327569803.00	110.73	8563201300.00	8875302164.21	103.64
2000	11680900000.00	11906546820.00	101.93	10690365000.00	11756432013.23	109.97
2001	14890850000.00	16359402805.00	109.86	11653230500.00	12038965241.56	103.31
2002	16955500000.00	18989797301.00	112.00	12617683750.00	13211537914.93	104.71
2003	22267500000.00	23588459511.39	105.93	15931916700.00	16544809595.62	103.85
2004	25894000000.00	27113855357.29	104.71	20395407280.00	23472219704.22	115.09
2005	28437148000.00	30589542164.00	107.57	27159878300.00	28683569216.38	105.61
2006	36171092061.00	38385172874.00	106.12	23861401400.00	19260036473.00	80.72

2007	40254327102.59	42395759461.00	105.32	22598079695.40	26051519089.00	115.28
2008	43538335236.92	48456451986.00	111.30	26267935664.00	32979350138.00	125.55
	Rata-Rata		107.88	Rata-Rata		106.96
	Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah		107.96	Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah		107.49
	Rata-rata Selama Otonomi Daerah		107.85	Rata-rata Selama Otonomi Daerah		106.76

Efektifitas PAD Kota Depok Tahun Anggaran 1998 - 2008

TAHUN	LABA BUMD			LAIN-LAIN PENDAPATAN		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1998	301650750.00	301965855.00	100.10	24610352210.00	23164985321.03	94.13
1999	279850635.00	300651258.62	107.43	22165903254.00	25632046921.30	115.64
2000	380056000.00	391203685.60	102.93	29630546800.00	31032685945.71	104.73
2001	365070000.00	415692031.65	113.87	35075065900.00	36089620312.56	102.89
2002	252600000.00	252610363.50	100.00	59005899904.00	53021168083.44	89.86
2003	761511617.00	816551606.07	107.23	13408374000.00	13408374000.00	100.00
2004	1040719067.75	1040719067.00	100.00	10411099000.00	10532549000.00	101.17
2005	1279902233.00	1279902233.00	100.00	13533200000.00	13533200000.00	100.00
2006	1661389352.00	1661389352.00	100.00	3000000000.00	3000000000.00	100.00
2007	26051519089.00	26051519089.00	100.00	169836404377.31	165673133768.00	97.55
2008	3756353155.00	2656353155.00	70.72	172366473898.00	162457932298.00	94.25
	Rata-Rata		100.21	Rata-Rata		100.02
	Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah		103.49	Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah		104.83
	Rata-rata Selama Otonomi Daerah		98.98	Rata-rata Selama Otonomi Daerah		98.21

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kota Depok Tahun 1998 - 2008

TAHUN	SUMBANGAN	BANTUAN	PINJAMAN	TOTAL	PAD	Ra Kema
1998	9858320000.00	1775000000.00	4952230000.00	16585550000.00	7566866368.00	45
1999	9496617000.00	13053000000.00	6500000000.00	29049617000.00	11463019000.00	39
2000	4695230000.00	32461456000.00	1640351000.00	38797037000.00	13453000000.00	34
2001	3750000000.00	65200000000.00	9750000000.00	78700000000.00	41174809473.00	52
2002	960750000.00	50000000000.00	7000000000.00	57960750000.00	31101240410.00	53
2003	800000000.00	7954000000.00	65200000000.00	73954000000.00	41165629524.00	55
2004	855000000.00	84650200000.00	895000000.00	86400200000.00	43702436417.00	50
2005	8030000000.00	60580200000.00	52306500000.00	120916700000.00	64060869669.00	52
2006	1980000000.00	45872500000.00	69850000000.00	117702500000.00	68631174736.00	58
2007	4850000000.00	76506096437.31	45814800000.00	127170896437.31	75457361774.00	59
2008	2357650000.00	76562891218.00	84895372000.00	163815913218.00	97139989566.00	59
Rata-rata						51
Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah						39
Rata-rata Pada Masa Otonomi Daerah						55

**Rasio Aktivitas Kota Depok Tahun 1998 - 2002
(Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan)**

TAHUN	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	APBD	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pemb.
1998	19682549760.00	12953645000.00	33091205000.00	59.48	39.15
1999	22566274500.00	14233607500.00	36799882000.00	61.32	38.68
2000	43712700500.00	47095275000.00	93620290252.00	46.69	50.30
2001	136660860475.00	106039861489.00	242700721964.00	56.31	43.69
2002	181468788000.00	157027752000.00	338496540000.00	53.61	46.39
Rata-rata				55.48	43.64
Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah				55.83	42.71
Rata-rata Pada Masa Otonomi Daerah				54.96	45.04

**Rasio Aktivitas Kota Depok Tahun 2003 - 2005
(Belanja Publik dan Belanja Aparatur Pemerintah)**

TAHUN	belanja publik	aparatur pemerintah	APBD	Rasio Belanja Publik	Rs. Belanja Aparatur
2003	266073418825.00	115068719984.02	393162362119.02	67.67	29
2004	309157258770.00	147702546630.00	462589805400.00	66.83	30
2005	365036611078.12	162330083867.15	534250694945.27	68.32	30
Rata-rata				67.61	30

**Rasio Aktivitas Kota Depok Tahun 2006 - 2008
(Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung)**

TAHUN	belanja langsung	belanja tidak langsung	APBD	Rasio Belanja Langsung	Rasio Belanja Tidak Langsung
2006	357479305643.00	317423131022.97	689819605865.97	51.82	46.01
2007	475935413945.35	416296639203.89	905315660949.24	52.57	45.98
2008	526690499833.29	504267579607.10	1044286727640.39	50.43	48.28
Rata-rata				51.61	46.76

**Kapasitas Fiskal Kota Depok
Tahun Anggaran 1998 - 2008**

Tahun	PDRB Jabar	PDRB Depok	Penduduk Jabar	Penduduk Depok	SKaFP Jateng	KaFK Depok
1998	16090290100000.00	32889310000	37652064.00	902062.00	16436.21	364.60

1999	16674171600000.90	33420820000	36549024.00	921464.00	17546.69	362.69
2000	17564507700000.70	34893130000	35724093.00	973036.00	18910.43	358.60
2001	18430414800000.80	36947220000	36195602.00	1204687.00	19584.21	306.70
2002	19193574200000.80	39202320000	30695203.00	1247233.00	24049.83	314.31
2003	21174782200000.30	41697550000	33062841.00	1289297.00	24632.33	323.41
2004	22334989100000.60	44408760001	36205663.00	1331559.00	23726.62	333.51
2005	23406224500000.40	47500340000	38965440.00	1374522.00	23103.53	345.58
2006	24881092200000.80	50661290000	39140812.00	1420480.00	24449.29	356.65
2007	27399500000000.10	54182460001	41483729.00	1470002.00	25403.38	368.59
2008	29652305200000.10	57423900000	43264206.00	1503677.00	26360.67	381.89
Rata-rata					22200.29	346.96
Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah					17631.11	361.96
Rata-rata Pada Masa Otonomi Daerah					23913.73	341.33

**Kebutuhan Fiskal Kota Depok
Tahun Anggaran 1997 - 2008**

Tahun	penduduk Depok	penduduk JaBar	Pengeluaran Jabar	Pengeluaran Depok	SKbFP JABAR	SKt DEF
1997	834556.00	39206787.00	1587923557800.00	18023521064.00	1557.74	215
1998	902062.00	37652064.00	1964587302000.00	19562859632.00	2006.82	216
1999	921464.00	36549024.00	2179184606543.00	22566274500.00	2293.22	244
2000	973036.00	35724093.00	2419664065812.00	43712700500.00	2605.08	449
2001	1204687.00	36195602.00	2632194865404.00	136660860475.00	2796.98	113
2002	1247233.00	30695203.00	3098265148633.00	181468788000.00	3882.17	145
2003	1289297.00	33062841.00	3132781224902.00	381142138819.02	3644.32	295
2004	1331559.00	36205663.00	3670567300180.00	456859805400.00	3899.27	343
2005	1374522.00	38965440.00	4309282267306.84	527366694945.27	4253.55	383
2006	1420480.00	39140812.00	5118814954732.31	674902436665.97	5029.98	475
2007	1470002.00	41483729.00	5271083679606.84	892232053149.24	4887.07	606
2008	1503677.00	43264206.00	5576843216089.57	1030958079440.39	4957.77	685
Rata-rata					3484.50	263
Rata-rata Sebelum Otonomi Daerah					2115.71	281
Rata-rata Pada Masa Otonomi Daerah					4168.89	381